



ISSN: 0854 - 4883

# JOURNAL

MAJALAH ILMIAH EKONOMI & BISNIS  
FAKULTAS EKONOMI - UNIVERSITAS Dr. SOETOMO

---

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA SURABAYA  
*Shanty Ratna Damayanti*

---

IDENTIFIKASI PRODUK UNGGULAN KABUPATEN LAMONGAN  
*Mustika Winedar  
Sukesi*

---

PENGARUH PELATIHAN KERJA TERHADAP PENINGKATAN  
PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI  
PADA PT. GATA PLASINDO MAKMUR DI SIDOARJO  
*Endang Susetyowati*

---

KAJIAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI  
*Alberta Esti*

---

ANALISIS ASPEK EKONOMI RENCANA PENGEMBANGAN  
PASAR INDUK KABUPATEN BONDOWOSO  
*Sukesi  
Sugiyanto*

---

PENGARUH RASIO PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM  
PERUSAHAAN FARMASI YANG GO PUBLIC  
DI BURSA EFEK INDONESIA  
*Ilya Farida*

---

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESETIAAN  
TERHADAP MEREK PADA PEMAKAI KOSMETIK  
PEMUTIH WAJAH PONDS DI SURABAYA  
*Harmani*

Volume XI

No. 1

DESEMBER

2008

## DAFTAR ISI :

Volume XI No. 1 Desember 2008

- 1  
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI  
DI KOTA SURABAYA**  
*Shanty Ratna Damayanti.*
- 17  
**IDENTIFIKASI PRODUK UNGGULAN  
KABUPATEN LAMONGAN**  
*Mustika Winedar  
Sukei*
- 37  
**PENGARUH PELATIHAN KERJA  
TERHADAP PENINGKATAN  
PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN  
BAGIAN PRODUKSI PADA PT. GATA  
PLASINDO MAKMUR DI SIDOARJO**  
*Endang Susetyowati*
- 54  
**KAJIAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI  
KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI**  
*Alberta Esti*
- 74  
**ANALISIS ASPEK EKONOMI RENCANA  
PENGEMBANGAN PASAR INDUK  
KABUPATEN BONDOWOSO**  
*Sukei  
Sugiyanto*
- 94  
**PENGARUH RASIO PROFITABILITAS  
TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN  
FARMASI YANG GO PUBLIC  
DI BURSA EFEK INDONESIA**  
*Ilya Farida*
- 112  
**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KESETIAAN TERHADAP MEREK PADA  
PEMAKAI KOSMETIK PEMUTIH WAJAH  
PONDS DI SURABAYA**  
*Harmani*

# JOURNAL

MAJALAH ILMIAH EKONOMI & BISNIS  
FAKULTAS EKONOMI - UNIVERSITAS Dr. SOETOMO

### PEMIMPIN REDAKSI :

Lumadya Adi, Drs., M.Si

### WAKIL PIMPINAN REDAKSI :

Ilya Farida, SE., M.M.

### REDAKTUR KHUSUS

Santoso S. Hamijoyo, Prof., Dr., M.Sc., Ph.D

Sri Edi Swasono, Prof., Dr.

Sukei, Dr., MM.

Ully Tampubolon, Dr. MM.

Suyanto, Dr. MM.

Darto Irawan, SE., MM.

Indrarini Utoro, Dra., Ec., MM.

Endang Susetyowati, Dra., Ec., MM.

Djoko Sudiro, Drs., M.Si.

Alberta Esti, SE., MM., Ak

### REDAKTUR :

Veronika Nugrahaini, SE., MM.

Sandra Oktaviana, SE., MM.

Mustika, SE., MM., Ak

### ALAMAT REDAKTUR :

Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo

Jl. Semolowaru 84 Surabaya

Telp. 031-5944752 Fax. 031-5964838

<http://ekonomi.unitomo.ac.id>

email: [ekonomi@unitomo.ac.id](mailto:ekonomi@unitomo.ac.id)

[journalfe@unitomo.ac.id](mailto:journalfe@unitomo.ac.id)

ISSN : 0854-4883

# KAJIAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI

Alberta Esti  
Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo Surabaya

## Abstrak

*Penelitian ini merupakan kajian terhadap penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengidentifikasi karakteristik PKL yang ada di Kecamatan Pare (2) Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh PKL di Kecamatan Pare (3) Untuk upaya pengembangan atau penataan dan penertiban kawasan sebagai alternatif lokasi PKL di Kecamatan Pare. Berdasarkan hasil analisa data maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kebijakan yang dapat dilakukan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang terkait dengan penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur*

## Pendahuluan

### Latar Belakang Masalah

Dampak adanya krisis ekonomi di Indonesia berakibat meningkatnya jumlah pengangguran dan masyarakat miskin. Salah satu alternatif kegiatan ekonomi masyarakat untuk tetap dapat bertahan hidup adalah menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Akan tetapi disamping dampak positif yang diperoleh dengan meningkatnya jumlah PKL di Kabupaten Kediri khususnya Kecamatan Pare, dampak negatif yang terjadi juga cukup besar antara lain : semakin banyaknya PKL yang berjualan di trotoar jalan dan badan jalan sehingga mengganggu aktifitas pejalan kaki dan adanya PKL yang berjualan di fasilitas umum akan mengganggu kenyamanan pengguna serta mengurangi keindahan kota.

Dengan keberadaan PKL yang menjamur, bila dilihat dari segi keindahan, ketertiban maupun keteraturan dalam sebuah tata kota memang tidak enak dipandang mata, semrawut, kumuh bahkan dapat mengganggu arus lalu lintas atau menjadi sebab kemacetan lalu lintas yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan umum.

Adanya razia PKL akhir – akhir ini menjadi trend diberbagai daerah untuk menciptakan sebuah kota yang bersih indah, teratur dan tertib. Kesulitan untuk menertibkan PKL bukan hanya terjadi di kota-kota besar seperti Surabaya. Berbagai kasus yang terjadi seperti penggusuran PKL yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota, bahkan pada akhir – akhir kebijakan penetapan jalan bebas PKL merupakan langkah kontroversial yang sebagian diikuti dengan tindakan kekerasan atau bentrokan antara petugas razia dengan para PKL. Hal tersebut merupakan fenomena yang menunjukkan indikator bahwa cara penertiban yang cenderung represif tidak efektif dan pada akhirnya menyulut perlawanan dan kemarahan PKL. Namun lebih dari itu dibutuhkan adalah pendekatan yang komprehensif, yakni menangani persoalan PKL dari berbagai sudut pandang, bukan hanya untuk kepentingan pemerintah daerah saja, tetapi diperlukan pemahaman karakteristik PKL, serta dukungan sikap yang lebih empatif dan menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

Dengan melihat kondisi diatas, sangat diperlukan upaya penataan PKL, yang nantinya diharapkan mereka dapat menjalankan aktifitas jual belinya di tempat yang representatif tanpa mengganggu kenyamanan dan tidak mengurangi keindahan kota, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan seperti yang diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah dan mengakses retribusi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk merencanakan model penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) diperlukan terlebih dahulu informasi tentang karakteristik dan permasalahan yang muncul dari PKL serta pengetahuan yang kompleks tentang ide-ide alternatif untuk memecahkan permasalahan PKL sebagai upaya perumusan kebijakan sektor informal PKL dari Pemerintah Kabupaten Kediri dengan memikirkan hak-hak maupun kewajiban mereka secara arif dan bijaksana sebagai wujud keadilan, serta komitmen memberdayakan masyarakat sebagaimana amanat Undang-undang otonomi daerah.

## **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengidentifikasi karakteristik PKL yang ada di Kecamatan Pare
- b. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh PKL di Kecamatan Pare
- c. Untuk upaya pengembangan atau penataan dan penertiban kawasan sebagai alternatif lokasi PKL di Kecamatan Pare

### **Manfaat Penelitian**

- a. Hasil analisa penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam rangka pengambilan kebijakan sektor informal tentang penataan dan penertiban PKL di Kabupaten Kediri.
- b. Hasil analisa penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang berminat dalam kajian tentang pedagang kaki lima, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik sektor informal PKL.

## **Landasan Teori**

### **Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Secara umum pengertian pedagang kaki lima berasal dari kata “kaki lima” yang semula merupakan suatu ordonansi, yang menentukan bahwa pada jalur-jalur tertentu diperlukan pengadaan jalur selebar 5 (lima) *feet* (lima kaki) atau sekitar 1,5 meter sebagai trotoar, yang selanjutnya dipakai untuk sebutan pedagang kaki lima atau tempat pedagang yang memanfaatkan trotoar (FT Unpar, 1980).

Berdasarkan ciri-ciri yang diungkapkan oleh Hidayat (1978: 7-8), pengertian pedagang kaki lima dapat dijabarkan sebagai :

- a. Kegiatan usaha yang tidak terorganisasikan secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas/ kelembagaan yang tersedia di sektor formal.

- b. Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
- c. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi cukup kecil.
- d. Pada umumnya unit usahanya termasuk "one man enterprise".
- e. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan penghasilan rendah dan menengah.

### **Fungsi Kegiatan Pedagang Kaki Lima**

Selain mempunyai peranan dalam menyerap angkatan kerja, kegiatan perdagangan kaki lima ini juga berperan pula dalam kegiatan perekonomian dan sosial lainnya. Sehubungan dengan fungsi yang dimiliki oleh kegiatan perdagangan kaki lima, secara umum memiliki 4 (empat) fungsi (Noegraha, 1986), yaitu :

- a. Fungsi Pelayanan Perdagangan Eceran
- b. Fungsi Pelayanan Jasa
- c. Fungsi Pelayanan Hiburan
- d. Fungsi Pelayanan Sosial – Ekonomi

### **Karakteristik Pedagang Kaki Lima**

Dalam melaksanakan kegiatan berdagang, terdapat beberapa karakteristik yang biasanya dilakukan oleh pedagang kaki lima, yaitu :

- A. Karakteristik Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Cara Melakukan Kegiatan  
Berdasarkan cara melakukan kegiatannya, pada dasarnya kegiatan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu (Wawoeroentoe, 1974) :
  - 1. *Pedagang Kaki Lima Menetap*
  - 2. *Pedagang Kaki Lima Berpindah*
  - 3. *Pedagang Kaki Lima Berkeliling*
- B. Karakteristik Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Sarana Jual yang Dipergunakan  
Ditinjau dari alat/ sarana jual yang dipergunakan, maka kegiatan perdagangan kaki lima dapat dibagi menjadi lima tipe dasar, yaitu (Wawoeroentoe, 1974) :

*Kajian Penataan Pedagang Kaki Lima  
di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri*

---

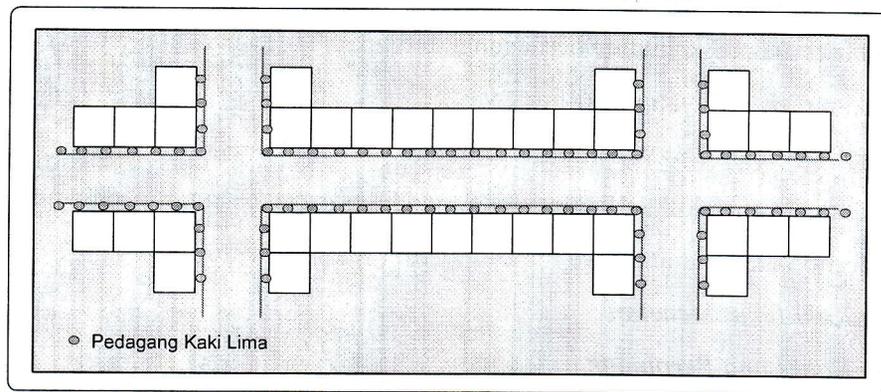
1. *Hamparan di Lantai*
2. *Pikulan*
3. *Meja/ Jongko*
4. *Kereta Dorong*
5. *Kios*

Selanjutnya menurut Mc. Gee dan Yeung membedakan sarana usaha menjadi tiga yaitu (McGee dan Yeung 1977 : 82-83) :

1. *Non Permanen (Mobile Hawker Units)*
  2. *Semi Permanen (Semistatic Hawker Units)*
  3. *Permanen (Static Hawker Units)*
- C. Pola Penyebaran Aktivitas PKL (Mc. Gee dan Yeung 1977 : 36)

Terdapat dua jenis pola penyebaran PKL menurut Mc. Gee dan Yeung, yaitu sebagai berikut :

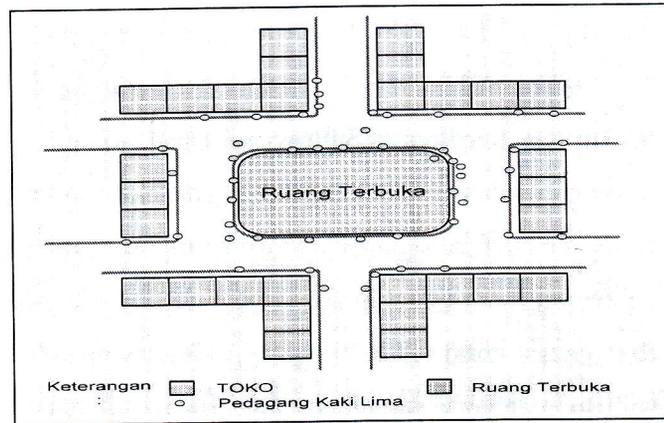
1. Pola penyebaran Memanjang (linear concentration)



Sumber : Mc. Gee dan Yeung, 1977: 37

Gambar 2.1. Pola Penyebaran Memanjang (linear)

2. Pola penyebaran mengelompok (focus agglomeration)



Sumber : Mc. Gee dan Yeung, 1977: 37

Gambar 2.2. Pola Penyebaran Mengelompok

D. Pola Pengelolaan Aktivitas PKL

Adapun pengelolaan dan pembinaan aktivitas PKL ini meliputi :

1. Pengelolaan Lokasional

Sektor informal diharapkan menempati lokasi yang sesuai dengan rencana penataan dari masing-masing kota (Mc. Gee dan Yeung, 1977 : 42 – 52). Kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah kota dapat dikelompokkan sebagai berikut : (Mc. Gee dan Yeung, 1977 : 51-56)

- a. Relokasi/ Pemugaran;
- b. Stabilisasi/ Pengaturan;
- c. Removal/ Pemindahan.

2. Pola Pengelolaan Struktural

Selain bentuk pengelolaan lokasional, pemerintah kota juga mencoba pola pengelolaan struktural (Mc. Gee dan Yeung, 1977 : 56-60). Adapun yang termasuk dalam pola pengelolaan struktural adalah sebagai berikut :

- a. Perijinan;
- b. Pembinaan;
- c. Bantuan/ pinjaman.

### **Peran Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Sektor Informal**

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pengembangan sektor informal antara :

1. Belum diakuinya sektor tersebut sebagai sektor yang mempunyai potensi besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia;
2. Para pejabat kota dan kaum elite lokal biasanya memandang sektor informal terutama pedagang kaki lima sebagai gangguan yang membuat kota menjadi kotor dan tidak rapi. (Alisyahbana, 2004 :128).

Bromley (dalam Manning dan Effenndi, 1985:228) berpendapat bahwa pedagang kaki lima biasanya digambarkan sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah pengangguran yang luas dan pertumbuhan yang luar biasa dari jenis pekerjaan sektor tersier yang sederhana di kota di Dunia Ketiga.

### **Model Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima**

Firdausy (1995:146) membagi model pengembangan PKL berdasarkan tujuannya menjadi tiga model, yaitu :

1. Model pengembangan PKL yang ditujukan untuk peningkatan kemampuan berkompetisi bagi PKL;
2. Model pengembangan PKL yang bertujuan hanya untuk meningkatkan pendapatan PKL dan perluasan kesempatan kerja bagi "*unskilled labour*";
3. Model pengembangan PKL yang bertujuan untuk peningkatan perekonomian nasional.

Lebih lanjut Firdausy (1995) mengemukakan empat kerangka model pengembangan sektor informal PKL, yaitu :

1. Model pengembangan sektor informal PKL berdasarkan atas kerjasama antar sesama PKL itu sendiri;
2. Model pengembangan sektor informal PKL berdasarkan atas kerjasama PKL dengan pihak swasta;
3. Model pengembangan sektor informal PKL berdasarkan atas kerjasama antar pihak PKL dengan pihak pemerintah kabupaten / kota
4. Model pengembangan sektor informal PKL berdasarkan atas kerjasama PKL dengan pihak swasta dan pemerintah.

#### **Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri**

Upaya untuk melakukan Kajian Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kebijaksanaan tata ruang wilayah yang tercermin dalam RTRW Nasional, RTRW Propinsi Jawa Timur, RTRW Kabupaten Kediri serta RUTRK dan RDTRK Kecamatan Pare

Untuk itu, perlu dilakukan tinjauan terhadap arahan tiap RTRW tersebut sesuai hirarkinya untuk wilayah perencanaan, terutama yang menyangkut:

- a. Rencana struktur tata ruang wilayah meliputi sistem pusat-pusat permukiman dan sistem prasarana wilayah.
- b. Rencana pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya.
- c. Rencana pengembangan kawasan andalan, kawasan prioritas.

Kebijaksanaan tata ruang yang banyak berkaitan dengan Penyusunan Kajian Penataan Kaki Lima (PKL) ini adalah sebagai berikut :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri

3. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kecamatan Pare Tahun 1996/1997  
– 2006/2007

### **Penentuan Lokasi**

Dalam mengidentifikasi dalam rangka penentuan lokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri digunakan kriteria-kriteri, yang dalam hal ini ada 5 (lima) aspek yaitu :

1. Aspek Lokasi Tapak

Aspek lokasi tapak ini mencakup dimensi daya tampung PKL, jarak dari lokasi awal PKL dan perkembangan PKL sekarang dan dimasa mendatang.

2. Aspek Transportasi

Aspek ini mencakup kepadatan lalu lintas, pengaturan lalu lintas, arah lalu lintas, dampak lalu lintas, ketersediaan angkutan umum, adanya trotoar, lahan parkir, jarak parkir dengan lokasi. Dan lokasi parkir itu sendiri.

3. Aspek Ekonomi

Aspek ini mencakup dimensi keramaian pengunjung, peningkatan penghasilan PKL, kemudahan akses dengan fasilitas lainnya (pasar, pertokoan alun-alun dll), keengganan penunjang untuk mendatangi lokasi PKL.

4. Aspek Sosial

Aspek ini mencakup dimensi keengganan PKL pindah, kemudahan penataan dan konflik dengan warga sekitar.

5. Aspek Lingkungan

Aspek ini mencakup keindahan, sampah, ketersediaan listrik dan Air bersih

---

## **Metodologi Penelitian**

### **Penjelasan Definisi Operasional dan Pengukurannya**

#### **Aspek Lokasi Tapak**

Aspek ini mempunyai bobot 15, yang mencakup dimensi daya tampung PKL (bobot 5), jarak dari lokasi awal (bobot 7) dan perkembangan PKL dimasa sekarang dan mendatang (bobot 3). Penentuan skoring lokasi tapak ini berdasarkan daya tampung PKL, jarak terhadap lokasi awal dan perkembangan PKL masing-masing dibagi menjadi 10 skor. Nilai tertinggi (skor 10) dan nilai terendah (skor 1).

#### **Aspek Transportasi**

Aspek ini mempunyai bobot 40, yang mencakup kepadatan lalu lintas (bobot 5), pengaturan lalu lintas (bobot 5), arah lalu lintas (bobot 3), lebar jalan (bobot 5), dampak adanya kemacetan (bobot 5), ketersediaan angkutan umum (bobot 3), adanya trotoar (bobot 3), ketersediaan lahan parker (bobot 5), jarak lahan parker terhadap lokasi PKL (bobot 3) dan lokasi parkir itu sendiri (bobot 4). Penentuan skoring untuk aspek transportasi ini, masing dibagi menjadi 10 skor juga, tertinggi (skor 10) dan terendah (skor 1)

#### **Aspek Ekonomi**

Aspek ini mempunyai bobot 25, yang terdiri dari keramaian pengunjung (bobot 10), peningkatan penghasilan PKL (bobot 5), kemudahan akses dengan fasilitas lainnya yaitu pasar, alun-alun dll (bobot 5), keengganan pengunjung (bobot 5), dimana masing-masing dibagi menjadi 10 skor, yaitu tertinggi (skor 10) dan terendah (skor 1)

#### **Aspek Sosial**

Aspek ini mempunyai bobot 10, yang terdiri dari keengganan PKL pindah (bobot 5), kemudahan penataan (bobot 3) dan konflik dengan warga sekitar (bobot 2), dimana masing-masing dibagi menjadi 10 skor, yang terendah (skor 10) yang tertinggi (skor 1).

### **Aspek Lingkungan**

Aspek ini mempunyai bobot 10, yang terdiri dari keindahan (bobot 4), sampah (bobot 2), listrik (bobot 2) dan air bersih (bobot 2), dimana masing-masing dibagi menjadi 10 skor, yang tertinggi (skor 10) dan yang terendah (skor 1).

### **Metode Pengumpulan Data**

Untuk kebutuhan pencarian dan pengumpulan data-data yang diperlukan maka digunakan beberapa cara antara lain survey, fokus Group (kelompok fokus), wawancara terstruktur, dan dokumentasi.

### **Teknik Analisis**

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan subyek / obyek survai (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (Nawawi, 1998 : 63) untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai penataan dan pengembangan PKL di wilayah Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Adapun tahap-tahap pengolahan dan analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima beserta jenis barang dagangannya, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1984).
2. Analisa data, dalam tahap ini, semua data dari berbagai sumber dianalisa untuk perumusan konsep dan pemanfaatan ruang koridor jalan. Analisa yang dilakukan adalah :
  - a. Analisa lingkup makro; yang bertujuan untuk mengetahui fungsi dan kedudukan wilayah perencanaan yang direncanakan dalam wilayah yang lebih

luas. Lingkup analisa ini untuk menggali dan mengetahui potensi di dalam wilayah perencanaan yang dipertimbangkan, dapat menunjang pengembangan wilayah yang lebih luas atau kemungkinan timbulnya permasalahan yang akan berpengaruh terhadap wilayah sekitarnya.

- b. Analisa tentang Kajian Pedagang Kaki Lima (PKL); bertujuan untuk mengetahui kondisi dan kemudian menganalisa untuk mengetahui karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL). Analisa ini berguna untuk menerapkan kebijaksanaan serta rekomendasi yang menjadi dasar penyusunan Kajian Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), yang mencakup sebagai berikut:
- Analisa data mengenai lokasi, jenis dagangan dan bentuk grobak Pedagang Kaki Lima (eksisting).
  - Analisa data mengenai fisik lingkungan termasuk rincian disekitar lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut
  - Analisa mengenai budaya/kultur
  - Analisa sistem hubungan, analisa ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sistem hubungan dan pergerakan yang ada, sehingga melahirkan output yang dapat dijadikan dasar penyusunan rencana pergerakan pada wilayah perencanaan. Adapun yang harus dianalisa berupa kaitan / besaran antara lain: (1) Jaringan jalan (2) Sistem parkir (3) Model / bentuk dan jenis pedestrian. (4) Halte / tempat pemberhentian (5) Tempat penyeberangan (*zebra cross*, jembatan, dsb).
- c. Analisis untuk penentuan lokasi bertujuan untuk menentukan lokasi baru untuk PKL, dimana metode yang digunakan adalah *Force Field Analysis* atau Metode Medan Kekuatan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam Metode ini adalah dengan menghitung total skor masing-masing aspek sesuai dengan criteria penilaian yang telah ditentukan .

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Hasil Penelitian**

Dari hasil survai, aspirasi atau keinginan masyarakat PKL yang diwakili oleh 50 orang responden pelaku PKL maupun pembeli dapat disajikan sebagai berikut :

1. Jenis barang dagangan yang selama ini dijajakan sudah sesuai dengan keinginan PKL. Hal ini dapat dilihat 90% menyatakan sudah sesuai dan hanya 10% yang menyatakan tidak sesuai. Dengan demikian keberadaan jenis dagangan yang selama ini dijajakan oleh sebagian besar PKL seperti makanan dan minuman sudah dirasakan cukup sesuai dengan keinginan PKL. Hal tersebut juga dikemukakan oleh sebagian besar pembeli yang menyatakan bahwa jenis dagangan yang sering dibeli adalah makanan/minuman, yakni dinyatakan oleh sebanyak 60% pembeli yang diwawancarai.
2. Selain kios, gerobak dan kereta dorong pada prinsipnya sebagian besar yaitu 55 PKL menginginkan sarana berdagang yang lebih baik dan bisa berkembang sehingga menarik lebih banyak pembeli, tempat berjualan yang lebih bagus, lebih mudah untuk dipindahkan, barang dagangan dapat tertata rapi, dan tempat aman dari obrakan petugas. Namun dari sudut pandang pembeli tempat berjualan yang paling disukai adalah kios 50% dan lesehan (30%). Hal ini bermakna bahwa dari sarana berdagang yang ada sekarang, para PKL di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri mengharapkan beberapa penyempurnaan tempat dagangannya agar lebih terlihat rapi, menarik pembeli dan aman dari razia petugas. Dengan demikian upaya penataan atau perbaikan sarana berdagang merupakan keinginan dan kebutuhan masyarakat PKL yang sebaiknya mendapat respon positif dari instansi pembina atau Pemerintah daerah.
3. Lokasi yang ditempati saat ini sudah sesuai dengan keinginan PKL hal ini dinyatakan oleh sebagian besar PKL yaitu sebanyak 40%, yaitu berada ditepi jalan sekitar perumahan dan mudah dicapai atau dikenal oleh konsumen. Keinginan lokasi

- berdagang berikutnya seperti yang dinyatakan oleh 30% adalah di trotoar karena mudah dicapai / dikenal, waktu berjualan lebih lama, dekat dengan perkantoran, dekat dengan perdagangan, dekat dengan pemukiman, ramai pembeli dan tidak sulit dicapai.
4. Dari segi konsumen ternyata lokasi berjualan yang paling diinginkan adalah bercampur antara PKL yang satu dengan lainnya yang dinyatakan oleh 70% karena konsumen bisa banyak pilihan, mengurangi persaingan dan dapat menarik konsumen lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam satu lokasi PKL memiliki banyak jenis atau macam dagangannya.
  5. Keinginan sebagian besar PKL di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atau dinyatakan oleh 90% untuk menetap dalam suatu tempat karena ingin memiliki tempat yang strategis dan memiliki konsumen yang tetap juga. Hal ini bermakna bahwa dengan memiliki lokasi yang tetap mereka akan memiliki tempat yang strategis dan dapat mendapatkan konsumen secara tetap atau langganan yang tetap.
  6. Rencana pengembangan PKL menurut keinginan PKL merupakan bagian dari upaya yang perlu diperhatikan dan diimplementasikan sebagai salah satu prasarat dalam penataan PKL di Kabupaten Kediri. Dari hasil survai ternyata ada rencana pengembangan yang diinginkan PKL seperti menetap di kios agar dapat bekerja tenang tidak khawatir dengan penertiban yang dinyatakan oleh 35%, namun sebagian besar yaitu 38%) belum tahu atau belum ada keinginan tentang rencana pengembangan usahanya.
  7. Sebagian besar PKL yang dinyatakan oleh 62% berkeinginan untuk melakukan buang sampah diperlukan tempat umum yang khusus untuk membuang sampah PKL pada lokasi-lokasi yang ditentukan. Hal ini bermakna bahwa untuk menjaga kebersihan dan keindahan perlu disediakan tempat umum yang dipergunakan oleh PKL untuk membuang sampahnya secara khusus dalam suatu lokasi.

8. Selain tempat sampah, sebagian besar PKL yang dinyatakan oleh 90% menghendaki agar disediakan WC Umum untuk melakukan buang air. Hal ini bermakna bahwa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diperlukan penyediaan fasilitas WC Umum untuk keperluan PKL maupun pembeli pada lokasi-lokasi yang diperuntukkan bagi PKL di Kabupaten Kediri.
9. Sarana dan prasarana lainnya yang menjadi prioritas keinginan PKL di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri antara lain Bak Sampah sebagai prioritas sebagian besar PKL yang dinyatakan oleh 45% responden, air bersih yang dinyatakan oleh 30% dan listrik yang dinyatakan oleh 25%. Hal ini bermakna bahwa untuk penataan dan penertiban PKL di Kabupaten Kediri perlu diperhatikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PKL.

### **Pembahasan**

Dari Hasil analisa data di atas, maka penataan terhadap pedagang kaki lima meliputi :

#### **Jenis Barang Dagangan**

Jenis barang dagangan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di wilayah Kecamatan Pare Kabupaten Kediri adalah makanan dan minuman, karena merupakan jenis dagangan yang sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga harus tetap dipertahankan.

#### **Gerobak Dagangan**

Pada dasarnya Pedagang Kaki Lima menginginkan juga mempunyai tempat yang lebih baik dan menarik, maka itu sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kediri memprogramkan untuk menyediakan gerobak yang diperuntukkan bagi PKL, sehingga kelihatan seragam, rapi dan menarik serta menambah keindahan kota.

### **Lokasi PKL**

Berdasarkan analisis menggunakan Metode Medan Kekuatan atau Force Field Analysis maka didapatkan lokasi baru PKL adalah sebagai berikut :

1. Perempatan TL. Rejo s/d Ringin Budha, dipindahkan ke lokasi Jl. Puncak Jaya.
2. Ringin Budha s/d RSUD / Garuda atau Jl. PB Sudirman, Pahlawan dan Bengawan, dipindah ke lokasi jalan Puncak Jaya dan jalan Matahari depan Masjid.
3. Garuda/RSUD s/d PMK atau Jalan Wahidin Sudirohusodo, tetap atau tidak dipindah.
4. Pasar Lama – Petigaan Pasar Hewan atau Jalan Letjen Sutoyo, dipindah kelokasi jalan disekitar pasar hewan dan didepan kolam renang.
5. Perempatan Pasar Lama s/d Perempatan Gd. Sewu atau Jalan Mastrip, dipindah kelokasi jalan Puncak Jaya.
6. Jalan Puncak Jaya, Jalan Jayawijaya dan jalan Lawu, tetap di Jalan Puncak Jaya.

Sedangkan untuk jangka menengah dan panjang Pemerintah Kabupaten Kediri dalam melakukan penataan PKL hendaknya melakukan hal-hal yang tidak menggunakan trotoar maupun badan jalan, yaitu sebagai berikut :

1. Jangka Menengah
  - Membuat PUJASERA, dimana PKL makanan dihimpun dalam PUJASERA sehingga disamping tidak mengganggu arus lalu lintas juga bisa dijadikan wisata kuliner.
  - PKL dipindahkan di pasar-pasar yang ada (kios) yaitu di Pasar-Pasar yang ada dengan memberikan kemudahan-kemudahan (misal harga kios, cara pembayaran dll).
2. Jangka Panjang
  - Perlu dilakukan kebijakan bahwa setiap kawasan perdagangan (pertokoan), Rumah Sakit Umum, Sekolah dll. Menyediakan tempat untuk berjualan Pedagang Kaki Lima.

### **Fasilitas Untuk PKL**

#### **a. Tempat Sampah**

Pada dasarnya PKL menginginkan disediakan tempat umum yang khusus untuk membuang sampah PKL, sehingga pada tempat lokasi dimana PKL berada harus disediakan tempat sampah umum dan bak sampah. Dengan penyediaan tempat sampah untuk PKL ini diharapkan kebersihan dan keindahan kota dapat tetap menjadi baik.

#### **b. WC Umum**

Pada dasarnya PKL menginginkan disediakan WC Umum, sehingga pada tempat lokasi PKL yang mempunyai jumlah PKL yang banyak harus disediakan WC Umum. Dengan penyediaan WC Umum untuk PKL ini diharapkan kebersihan dan keindahan kota dapat tetap menjadi baik.

### **Kesimpulan dan Saran.**

#### **Kesimpulan**

1. PKL di Kabupaten Kediri sebagian besar adalah laki-laki yang berusia antara 18 sampai dengan 40 tahun, berpendidikan rendah (SD), telah berkeluarga(menikah), berasal dari luar Kabupaten Kediri yang telah memiliki tempat tinggal dan menetap di Kabupaten Kediri, serta tidak memiliki pekerjaan sebelum menjadi PKL dan lebih menyukai profesi sebagai PKL daripada berpindah mata pencaharian yang lain.
2. Karakteristik pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Kediri adalah :
  - Dalam menjalankan aktivitasnya sebagai PKL di Kabupaten Kediri sebagian besar memilih jenis dagangan makanan dan minuman, melakukan usahanya di pagi hari, sudah lebih dari 2 tahun sebagai PKL, memperoleh barang dagangan secara lokal dari wilayah kabupaten Kediri, memiliki tempat sendiri.

- Dari segi kondisi fisik /tempat usaha sebagian besar memilih trotoar dan sebagian badan jalan sebagai lokasi berjualan yang dianggap cukup strategis dan ramai pembeli dengan menggunakan gerobak sebagai sarana untuk usaha dan ukuran ruang usaha yang luasnya tidak lebih dari 5 meter persegi, jarak tempuh dari tempat tinggal ke lokasi usaha tidak lebih dari 10 km dan dapat ditempuh dengan jalan kaki, serta cenderung menetap pada lokasi tertentu dan berpindah apabila terkena razia petugas.
- Dari aspek permodalan sebagian besar menggunakan modal kerja sendiri, memiliki jumlah keluarga yang harus ditopang dan tidak ada anggota keluarga yang memiliki pekerjaan lain, rata-rata pendapatan setiap bulannya berkisar antara Rp.301.000,- sampai dengan Rp.500.000,- sehingga keinginan untuk menabung tidak selalu tercapai karena hanya cukup untuk beban sekolah dan kebutuhan makan sehari-hari.

3. Permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

- Kurangnya modal usaha, pengetahuan tentang Perda Pengaturan PKL masih kurang
  - Kesan yang cenderung keberatan terhadap kebijakan penertiban PKL
4. Untuk jangka pendek perlu dilakukan pemindahan lokasi PKL berdasarkan Metode Medan Kekuatan atau Force Field Analysis, untuk jangka anjang dan menengah perlu diambil kebijakan terkait penataan PKL.

**Saran**

Saran-saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya perangkat lunak, berupa pedoman pemanfaatan dan pengelolaan PKL, dan pedoman kemitraan antar stakeholder. Pedoman tersebut perlu mendasarkan pada konsep penataan PKL, yang menyangkut lokasi jualan, jenis dagangan, dan waktu usahanya hanya pagi hari, siang dan malam, serta daerah mana yang bisa untuk jualan sepanjang hari.

- b. Dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman pada masyarakat akan penataan PKL dapat dilakukan melalui peningkatan kampanye publik dan pelayanan publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (*public awarrness*).
- c. Perlunya penataan kelembagaan yang menjangkau seluruh PKL dan stakeholder (*grass root*) sehingga kepedulian terhadap pemanfaatan dan pengendalian PKL diharapkan dapat meningkat.
- d. Perlunya peningkatan kemitraan (*partnership*) dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan ruang usaha bagi PKL agar partisipasi seluruh stakeholder dapat terdorong.
- e. Berbagai upaya penataan PKL hendaknya bersifat tidak menggusur, memberi peluang dan kesempatan, tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas (pelanggan memarkir kendaraan di badan jalan), serta bertujuan untuk mengoptimalkan potensi penggalan PAD melalui retribusi PKL yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ramli, R,1992. *Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima*, Jakarta Ind-Hill. Co.
- Yeung, Yeu-man & T.G. Mc.1986, Geung, *Community Participation in Delivery Urban Services in Asia*, International Development Research Centre.
- Firdausy,1995, *Pengembangan Sektor Informal PKL di Perkotaan*, Dewan Riset dan Nasional Nasional dan BAPPENAS bekerjasama dengan Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan, LIPI.
- Alisyahbana,2006, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, ITS Press.
- Hidayat, 1995, *Pengembangan Sektor Informal PKL di Perkotaan*, Dewan Riset dan Nasional Nasional dan BAPPENAS bekerjasama dengan Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan, LIPI.
- Pemerintah Kabupaten Kediri, *Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kecamatan Pare Tahun 1996/1997 – 2006/2007 dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kecamatan Pare Tahun 1996/1997 – 2006/2007*
- Harsiwi M. Agung, 2003, Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 14-1.